

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG PENELITIAN**

Dinamika tata kelola pemerintahan kontemporer saat ini menitikberatkan pada urgensi mutu layanan terhadap masyarakat yang berlandaskan pada pilar akuntabilitas serta efisiensi birokrasi. Aparatur negara kini dituntut untuk tidak sekadar menjalankan rutinitas administratif, melainkan wajib mentransformasikan setiap alokasi sumber daya menjadi hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Pemerintah tidak lagi cukup hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga harus mampu mempertanggungjawabkan setiap program, kegiatan, dan penggunaan sumber daya kepada publik. Dalam konteks ini, laporan pertanggungjawaban program memiliki posisi yang sangat penting karena menjadi salah satu instrumen utama untuk menilai sejauh mana pelaksanaan kegiatan pemerintah telah berjalan sesuai rencana, ketentuan, dan tujuan yang ditetapkan. Eksistensi laporan pertanggungjawaban program seharusnya tidak dipandang sebatas tumpukan dokumen prosedural semata. Sebagaimana ditegaskan oleh Mahmudi (2019), instrumen ini merupakan cermin dari integritas tata kelola institusi publik yang merepresentasikan sejauh mana mandat rakyat diimplementasikan secara konkret di lapangan (Mahmudi, 2019).

Secara legalitas, mandat bagi pemerintah daerah untuk menjalankan tata kelola yang kredibel memiliki dasar hukum yang kuat, salah satunya melalui regulasi otonomi daerah yang mewajibkan akuntabilitas kepada masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, Mahmudi (2019) mengemukakan bahwa akuntabilitas di sektor publik merupakan kewajiban moral bagi aparatur untuk menyajikan realitas kerja kepada masyarakat selaku pemberi mandat utama. Oleh karena itu, keberadaan laporan pertanggungjawaban tidak boleh dianggap sebagai formalitas di atas kertas, melainkan sebagai manifestasi integritas organisasi dalam menjalankan amanah publik.. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah memperkuat kewajiban instansi pemerintah untuk menyusun laporan keuangan dan laporan kinerja secara sistematis, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, kebijakan evaluasi akuntabilitas kinerja melalui regulasi dari Kementerian PAN-RB menunjukkan bahwa kualitas kinerja instansi publik tidak bisa dilepaskan dari kualitas pelaporan dan pengelolaan data internal (Republik Indonesia, 2006).

Dalam pandangan Mahmudi, akuntabilitas sektor publik merupakan kewajiban agen pemerintah untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan menyajikan segala aktivitas kepada prinsipal, yaitu masyarakat sebagai pihak yang memberi mandat. Pandangan ini menegaskan bahwa akuntabilitas bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan tanggung jawab moral dan institusional untuk memastikan bahwa layanan publik dilaksanakan secara benar, terukur, dan terbuka. Dengan demikian, laporan pertanggungjawaban program berfungsi sebagai jembatan antara pelaksana kebijakan dan pihak yang berkepentingan terhadap hasil kerja pemerintah (Mahmudi, 2019).

Di tingkat kecamatan, tuntutan tersebut menjadi semakin penting karena kecamatan merupakan perangkat daerah yang berada pada garis depan pelayanan publik. Kecamatan tidak hanya berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten, tetapi juga menjadi unit kerja yang berhadapan langsung dengan kebutuhan administratif masyarakat. Oleh karena itu, kualitas personil dalam mengelola administrasi, menyusun laporan, mengintegrasikan data, dan memahami alur pertanggungjawaban sangat menentukan kualitas pelayanan yang dirasakan masyarakat. Jika kemampuan staf masih terbatas, maka proses penyusunan laporan berpotensi terlambat, tidak sinkron, atau kurang mencerminkan kondisi riil pelaksanaan program (Sedarmayanti, 2017).

Berdasarkan dengan adanya penelitian ini mengambil lokasi di Kecamatan Bojonegoro dan berfokus pada strategi penguatan kapasitas pegawai dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban program serta dampaknya terhadap kinerja pelayanan. Kecamatan Bojonegoro sebagai unit pelayanan publik memiliki beban kerja yang cukup kompleks karena berada di pusat aktivitas pemerintahan kabupaten. Dengan jumlah pegawai Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara yang cukup besar, koordinasi antarseksi menjadi hal yang sangat penting agar setiap program dapat didokumentasikan dan dilaporkan secara tepat. Namun dalam praktiknya, tantangan yang sering muncul adalah perbedaan pemahaman antar karyawan, belum optimalnya integrasi data, serta kecenderungan sebagian pegawai memandang laporan sebagai formalitas administratif semata (Dwiyanto, 2021).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kapasitas personil dalam penyusunan laporan belum sepenuhnya merata. Padahal, dalam perspektif pengembangan kapasitas aparatur, peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan kunci untuk memperkuat kinerja organisasi publik. Capacity building tidak hanya berkaitan dengan pelatihan teknis, tetapi juga mencakup penguatan organisasi, koordinasi kerja, pemahaman peran, serta kemampuan menyesuaikan diri terhadap tuntutan regulasi. Ketika penguatan kapasitas dilakukan secara konsisten, staf akan lebih mampu menyusun laporan yang akurat, tepat waktu, dan sesuai standar. Sebaliknya, jika kapasitas aparatur tidak ditingkatkan, maka kualitas laporan cenderung rendah dan akan berpengaruh pada proses evaluasi maupun pengambilan keputusan di tingkat pimpinan (Grindle, 1997).

Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa penguatan kapasitas aparatur dan sistem pendukung berperan penting dalam meningkatkan kualitas laporan pertanggungjawaban. Hasil penelitian mengenai LKJIP menegaskan bahwa penguatan kapasitas sumber daya manusia dan koordinasi antarunit dapat membantu meminimalkan keterlambatan dokumen pendukung serta meningkatkan ketepatan waktu dan kualitas pelaporan. Selain itu, kajian lain menunjukkan bahwa kemampuan pegawai memiliki pengaruh terhadap kualitas pelayanan publik, karena pegawai yang kompeten cenderung mampu bekerja lebih efektif, responsif, dan profesional dalam melaksanakan tugas pelayanan. Temuan-temuan ini memperkuat dugaan bahwa kualitas pelayanan publik di kecamatan sangat dipengaruhi oleh kapasitas staf yang bekerja di dalamnya.jurnal (Mulyadi et al., 2020).

Dalam konteks pelayanan publik, kualitas kinerja tidak hanya dinilai dari cepat atau lambatnya pelayanan, tetapi juga dari akurasi, kepastian prosedur, tanggung jawab, dan kemampuan aparatur dalam menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat. Mardiasmo menegaskan bahwa pengukuran kinerja sektor publik penting untuk membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program, meningkatkan

efisiensi dan efektivitas, serta mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Pandangan ini menunjukkan bahwa laporan pertanggungjawaban program berkaitan langsung dengan kualitas kinerja organisasi, karena laporan yang baik akan mendukung evaluasi yang baik pula (Mardiasmo, 2018).

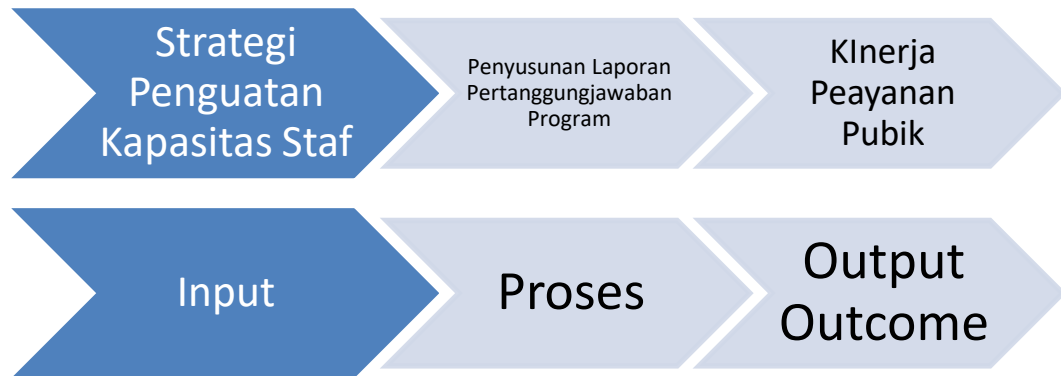
Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa masalah penyusunan laporan pertanggungjawaban program bukan sekadar persoalan teknis administrasi, melainkan bagian dari persoalan kapasitas sumber daya manusia dan kinerja pelayanan publik. Di Kecamatan Bojonegoro, kebutuhan untuk memperkuat kapasitas menjadi semakin mendesak karena laporan pertanggungjawaban yang berkualitas akan mendukung pengambilan keputusan, memperbaiki koordinasi internal, dan meningkatkan citra pelayanan publik di mata masyarakat. Oleh sebab itu, penelitian ini penting dilakukan untuk melihat bagaimana strategi penguatan kapasitas dilaksanakan, bagaimana proses penyusunan laporan dilakukan, dan bagaimana dampaknya terhadap kinerja pelayanan di Kecamatan Bojonegoro (Sugiyono, 2019).

Penelitian ini juga relevan secara akademik karena menggabungkan tiga aspek penting sekaligus, yaitu penguatan kapasitas dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban program, dan kinerja pelayanan publik. Dengan mengkaji ketiganya secara bersamaan, Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih utuh tentang bagaimana proses akuntabilitas internal bekerja di level kecamatan. Di sisi lain, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan praktis bagi pemerintah kecamatan untuk memperbaiki pelatihan, koordinasi, dan tata kelola administrasi agar lebih efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip birokrasi yang baik (Hardiyansyah, 2018).

**Tabel 1. Regulasi pendukung**

| No | Regulasi                                                                         | Relevansi dalam penelitian                                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1  | UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah                               | Menjadi dasar kewenangan dan pertanggungjawaban pemerintah daerah |
| 2  | PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah | Menegaskan kewajiban penyusunan laporan kinerja dan keuangan      |
| 3  | Permen PAN-RB Nomor 88 Tahun 2021                                                | Menjadi dasar evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah  |

**Gambar 1. Alur hubungan variabel penelitian**



## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Rumusan masalah ini penting karena kapasitas pegawai merupakan salah satu faktor utama yang menentukan kualitas kerja aparatur dalam organisasi publik. Menurut Grindle, *capacity building* tidak hanya menyangkut peningkatan kemampuan individu, tetapi juga penguatan organisasi dan kelembagaan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lebih efektif. Sejalan dengan itu, Mahmudi menjelaskan bahwa akuntabilitas sektor publik menuntut aparatur untuk mampu mengelola dan melaporkan setiap kegiatan secara bertanggung jawab kepada masyarakat. Dengan demikian, strategi penguatan kapasitas staf menjadi kunci agar penyusunan laporan pertanggungjawaban program dapat dilakukan secara tepat, akurat, dan sesuai tuntutan administrasi pemerintahan.

1. Bagaimanakah strategi penguatan kapasitas staf dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LKJIP) program di Kecamatan Bojonegoro?
2. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan strategi penguatan kapasitas staf dalam penyusunan LKJIP di Kecamatan Bojonegoro?

## **C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN**

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan arah utama yang ingin dicapai oleh peneliti melalui kegiatan penelitian yang dilakukan. Dalam proposal skripsi, tujuan penelitian harus disusun secara jelas, sistematis, dan selaras dengan rumusan masalah. Artinya, apa yang menjadi pertanyaan dalam rumusan masalah harus dijawab dalam tujuan penelitian dalam bentuk pernyataan positif.

Dalam penelitian ini, tujuan utama yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis strategi penguatan kapasitas staf dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban program di Kecamatan Bojonegoro. Fokus utama penelitian bukan hanya pada hasil akhir berupa laporan, tetapi juga pada proses yang melatar belakangi bagaimana staf dibina, diarahkan, dan diperkuat kemampuannya agar mampu menyusun laporan secara lebih baik.

Secara lebih rinci, tujuan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan strategi penguatan kapasitas staf dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LKJIP) program di Kecamatan Bojonegoro.
2. Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan faktor pendukung serta penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan penguatan kapasitas staf tersebut..

Karena Anda menggunakan teori Grindle dan Mahmudi, berikut indikator yang harus Anda cari di lapangan :

1. Indikator Penguatan Kapasitas (Grindle) :

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia : Pelatihan teknis penyusunan LKJIP, kecepatan staf memahami aplikasi pelaporan.

2. Penguatan Organisasi : Adanya SOP yang jelas dan dukungan sarana prasarana kerja.
3. Reformasi Institusi : Perubahan budaya kerja dan disiplin waktu dalam pelaporan.

## 2. Indikator Kinerja Pelayanan (Mahmudi) :

1. Responsivitas : Kecepatan staf dalam merespons revisi laporan atau kebutuhan data masyarakat.
2. Efektivitas : Kesesuaian antara rencana program dengan hasil yang dilaporkan dalam LKJIP.
3. Akuntabilitas : Kemudahan akses data LKJIP bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Tujuan tujuan tersebut disusun agar penelitian tidak melebar ke pembahasan lain yang tidak relevan. Dengan adanya tujuan yang jelas, maka peneliti dapat lebih terarah dalam mengumpulkan data, menganalisis temuan, dan menarik kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif, tujuan penelitian sangat penting karena menjadi dasar dalam menentukan fokus penelitian, informan, teknik pengumpulan data, serta cara menganalisis hasil penelitian.

## 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian adalah manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penelitian, baik secara teoritis maupun praktis. Dalam penyusunan proposal skripsi, bagian ini sangat penting karena menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan tidak hanya berguna bagi peneliti sendiri, tetapi juga dapat memberi

kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak-pihak yang terkait dengan objek penelitian.

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu administrasi publik, khususnya yang berkaitan dengan kapasitas aparatur, akuntabilitas sektor publik, dan kinerja pelayanan publik. Melalui penelitian ini, diharapkan ada penambahan pengetahuan mengenai bagaimana penguatan kapasitas staf dapat berpengaruh terhadap kualitas penyusunan laporan pertanggungjawaban program.

Penelitian ini juga dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa atau peneliti lain yang ingin mengkaji tema serupa, terutama dalam konteks pemerintahan daerah, kecamatan, dan pelayanan publik. Dengan demikian, hasil penelitian tidak berhenti sebagai laporan akademik semata, tetapi dapat menjadi sumber ilmiah yang memperkaya kajian-kajian berikutnya.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi Kecamatan Bojonegoro, khususnya dalam meningkatkan kapasitas staf yang terlibat dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban program. Jika hasil penelitian menunjukkan adanya kendala dalam koordinasi, kemampuan teknis, atau pemahaman staf terhadap pelaporan, maka temuan tersebut bisa menjadi bahan evaluasi bagi pimpinan untuk memperbaiki sistem pembinaan internal.

Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Hasil penelitian dapat dijadikan pertimbangan dalam merancang pelatihan, bimbingan teknis, penguatan koordinasi, serta pembinaan aparatur agar mereka lebih siap menjalankan tugas administrasi dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan begitu, manfaat penelitian tidak hanya dirasakan oleh instansi yang diteliti, tetapi juga dapat mendukung perbaikan tata kelola pemerintahan secara lebih luas.

#### **D. SISTEMATIKA PEMBAHASAN**

Sistematika penulisan merupakan susunan isi proposal skripsi yang dibuat secara runtut agar pembaca dapat memahami alur pembahasan penelitian dengan mudah. Melalui sistematika ini, peneliti dapat menunjukkan hubungan antara latar belakang, teori, metode, hasil penelitian, dan penutup secara lebih terarah. Proposal skripsi ini disusun dalam lima bab utama, yaitu Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil dan Pembahasan, serta Bab V Penutup.

##### **1. Bab I Pendahuluan**

Memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini menjelaskan alasan penelitian dilakukan, persoalan yang ingin dikaji, dan arah penelitian yang hendak dicapai. Dalam bab ini juga dijelaskan pentingnya penelitian mengenai strategi penguatan kapasitas staf dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban program di Kecamatan Bojonegoro.

## **2. Bab II Tinjauan Pustaka**

Berisi penelitian terdahulu dan landasan teori Penguatan Kapasitas (*Capacity Building*) Merilee S. Grindle yang mendukung penelitian. Pada bab ini dijelaskan konsep-konsep yang berkaitan dengan kapasitas staf, akuntabilitas sektor publik, laporan pertanggungjawaban program, dan kinerja pelayanan publik. Bab ini penting untuk memberikan dasar ilmiah agar penelitian memiliki landasan teori yang kuat.

## **3. Bab III Metode Penelitian**

Menjelaskan jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, informan, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan keabsahan data. Bab ini menunjukkan langkah-langkah yang digunakan peneliti untuk memperoleh data secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka penjelasan metode penelitian dibuat secara rinci agar proses penelitian dapat dipahami dengan jelas.

## **4. Bab IV Hasil dan Pembahasan**

Memuat hasil temuan di lapangan serta pembahasannya berdasarkan teori yang digunakan. Pada bab ini peneliti menjelaskan kondisi nyata di Kecamatan Bojonegoro, bagaimana strategi penguatan kapasitas staf diterapkan, serta dampaknya terhadap penyusunan laporan dan kinerja pelayanan. Bab ini menjadi inti dari penelitian karena berisi analisis terhadap data yang diperoleh.

## **5. Bab V Penutup**

Berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil pembahasan dan harus mampu menjawab rumusan masalah. Sementara itu, saran diberikan sebagai masukan bagi pihak terkait maupun penelitian selanjutnya agar hasil penelitian dapat memberikan manfaat yang lebih luas.